

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Ruang Belajar Aqil menghadirkan beragam program pendidikan, pelatihan keterampilan, dan kegiatan pemberdayaan, Ruang Belajar Aqil bertujuan untuk memperkuat kapasitas masyarakat dalam menghadapi tantangan sosial, ekonomi, dan pendidikan. Untuk memahami dampak dan efektivitas program-program yang sejenisnya, sejumlah penelitian telah dilakukan oleh para akademisi dan praktisi di bidang pengembangan masyarakat. Dalam konteks ini, penulis akan mengeksplorasi beberapa penelitian terdahulu yang membahas pemberdayaan masyarakat melalui program peningkatan kualitas hidup, penelitian terdahulu tersebut diantaranya:

Jurnal Pertama: "Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat Desa (P2MD) Di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Kepulauan Selayar" oleh Ahmad (2021). Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan aktor-aktor yang terkait dalam pelaksanaan program didasarkan pada ketentuan regulasi yang berlaku terkait program tersebut yang ditetapkan oleh lembaga terkait. Pada aspek lain, karakteristik pemerintah yang terlibat mulai dari pemerintah pusat sampai pemerintah desa. Adapun lembaga selain pemerintah yang terlibat secara formal tidak ada selain kelompok masyarakat yang bertindak sebagai pelaksana sekaligus sasaran program pemberdayaan. Kepatuhan para pihak yang

terkait sebagai pelaksana program pemberdayaan masyarakat berjalan dengan baik. Capaian kinerja secara substansi dan administratif sesuai target dalam perencanaan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Ahmad (2021) sama-sama melakukan kajian mengenai implementasi program sedangkan perbedaannya yaitu terdapat pada implementasi program yang dilaksanakan, dimana dalam penelitian ini fokus pada implementasi program kepedulian dan pembelajaran.

Penelitian Kedua:" Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin Pada Komunitas Nelayan Tradisional Untuk Kesejahteraan Sosial Ekonomi di Lontar Kabupaten Serang " oleh Teguh Aris Munandar (2020). Hasil: Program Seribu Kampung Nelayan Tangguh Indah Mandiri (Sekaya Maritim) yang diterapkan mulai Februari 2015, mampu memperbaiki kehidupan nelayan, Berkurangnya jumlah penduduk miskin belum tercapai secara optimal hal ini disebabkan oleh kerusakan ekosistem laut yang semakin parah, abrasi pantai, kelangkaan ikan tangkap nelayan, serta hancurnya karang laut..hal tersebut yang menyebabkan nelayan banyak yang tidak melaut dan menjadi salah satu factor penyebab kemiskinan nelayan. Berkembangnya usaha peningkatan pendapatan yang dilakukan oleh penduduk miskin dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia dalam bentuk budidaya rumput laut di Desa Lontar Kabupaten Serang yang awalnya berkembang pesat, tetapi dampak penambangan pasir mengakibatkan terjadinya abrasi pantai dan tambak. Sedangkan budidaya rumput laut membutuhkan gundukan pasir yang berfungsi sebagai pemecah

gelombang. Sehingga gelombang ombak tidak menerjang keras rumput laut yang menyebabkan rumput laut rontok. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Teguh Aris Munandar (2020) sama-sama melakukan kajian mengenai implementasi program sedangkan perbedaannya yaitu penelitian terdahulu fokus pada implementasi program pada komunitas terkait dengan peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonomi.

Jurnal Ketiga: " Implementasi Program Pemberdayaan Sosial Dan Pelayanan Kemanusiaan di Yayasan Mutiara Harapan " oleh Rafi Audy Nugraha (2022). Hasil: Yayasan Mutiara Harapan memiliki beberapa program yang diantaranya yaitu wakaf, pendidikan, kemanusiaan, dan keagamaan. Dari setiap program tersebut memiliki kegiatan yang berbeda-beda. Kedua, Implementasi program pemberdayaan dan pelayanan diantaranya; (1) Program pendidikan terdiri dari kegiatan Gerakan orangtua peduli, kegiatan rumah bimbil, pelatihan komputer, dan wisata anak ceria, (2) program kemanusiaan terdiri dari jumat bersih, beras nusantara untuk keluargaku, cek kesehatan gratis, membangun kemandirian ekonomi, peduli bencana alam, (3) program keagamaan terdiri dari dzikir dan doa bersama, tahfidz al-quran kegiatan bulan Ramadhan. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Rafi Audy Nugraha (2022) yaitu fokus pada implementasi program pemberdayaan sosial dan pelayanan kemanusiaan dan persamaan yaitu sama-sama melakukan kajian mengenai implementasi program.

Penelitian keempat, " Implementasi Program Pemberdayaan Anak Jalanan Pada Dinas Sosial Kota Probolinggo (Studi Kasus Gelandangan, Pengemis dan Pengamen Kota Probolinggo) " oleh Husni Mubarog (2023). Hasil: Implementasi program pemberdayaan anak jalanan yang dilakukan pada Dinas Sosial Kota Probolinggo sebagai lembaga sosial untuk pengganti orang tua dalam menjalankan tugasnya atau tanggungjawabnya dengan cara Dinas Sosial Kota Probolinggo memberikan pelayanan sosial yang meliputi pembinaan mental pendidikan dan pelatihan keterampilan yang mempunyai tujuan agar dapat tumbuh kembang secara wajar dan siap mandiri untuk memperoleh masa depan yang baik atau masa depan yang cerah sehingga bermanfaat bagi masyarakat dan bangsa. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Husni Mubarog (2023) sama-sama melakukan kajian mengenai implementasi program sedangkan perbedaannya yaitu penelitian terdahulu fokus pada implementasi program pemberdayaan anak jalanan.

## **B. Konsep Implementasi Program**

### **1. Pengertian Implementasi**

Terdapat berbagai pendapat para ahli dan akademisi yang mengemukakan tentang pengertian dari implementasi. Hal ini perlu dijelaskan agar pemahaman tentang implementasi dapat disinkronisasikan dari konsep penelitian terhadap suatu kebijakan atau peraturan perundangan-undangan yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini. Karena implementasi merupakan kegiatan yang penting

dari keseluruhan proses perencanaan kebijakan. Adapun pengertian implementasi tersebut dapat dilihat dalam beberapa pendapat di bawah ini:

Menurut Mulyadi (2015:12), implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya. Implementasi pada hakikatnya juga merupakan upaya pemahaman apa yang seharusnya terjadi setelah program dilaksanakan. Dalam tataran praktis, implementasi adalah proses pelaksanaan keputusan dasar.

Proses tersebut terdiri atas beberapa tahapan yakni:

- a. Tahapan pengesahan peraturan perundangan.
- b. Pelaksanaan keputusan oleh instansi pelaksana.
- c. Kesiadaan kelompok sasaran untuk menjalankan keputusan.
- d. Dampak nyata keputusan baik yang dikehendaki maupun tidak.
- e. Dampak keputusan sebagaimana yang diharapkan instansi pelaksana.
- f. Upaya perbaikan atas kebijakan atau peraturan perundangan.

Proses persiapan implementasi setidaknya menyangkut beberapa hal penting yakni:

- 1) Penyiapan sumber daya, unit dan metode.
- 2) Penerjemahan kebijakan menjadi rencana dan arahan yang dapat diterima dan dijalankan.
- 3) Penyediaan layanan, pembayaran dan hal lain secara rutin.

Implementasi menurut teori Jones (Mulyadi, 2015:45): *“Those Activities directed toward putting a program into effect”* (proses mewujudkan program hingga memperlihatkan hasilnya), sedangkan menurut Horn dan Meter: *“Those actions by public and private individual*

*(or group) that are achievement or objectives set forth in prior policy*” (tindakan yang dilakukan pemerintah). Jadi implementasi adalah tindakan yang dilakukan setelah suatu kebijakan ditetapkan. Implementasi merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya.

Selanjutnya menurut Lister (Taufik dan Isril, 2013:136), “sebagai sebuah hasil, maka implementasi menyangkut tindakan seberapa jauh arah yang telah diprogramkan itu benar-benar memuaskan”. Grindle (Mulyadi, 2015:47), “menyatakan implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu”. Sedangkan Horn (Tahir, 2014:55), “mengartikan implementasi sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh baik individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam kebijakan”.

Taufik dan Isril, (2013:136) menyatakan, “bahwa definisi implementasi secara eksplisit mencakup tindakan oleh individu/kelompok privat (swasta) dan publik yang langsung pada pencapaian serangkaian tujuan terus menerus dalam keputusan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya” Kemudian Gordon (Mulyadi, 2015:24) menyatakan, “implementasi berkenaan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan pada realisasi program.” Menurut Syahida, (2014:10), “implementasi berarti menyediakan sarana untuk

melaksanakan suatu kebijakan dan dapat menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu”. Naditya dkk (2013:1088) menyatakan, “dasar dari implementasi adalah mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan”.

Berdasarkan berbagai pendapat di atas tersebut dapat diketahui bahwa pengertian implementasi merupakan suatu proses yang berkaitan dengan kebijakan dan program-program yang akan diterapkan oleh suatu organisasi atau institusi, khususnya yang berkaitan dengan institusi negara dan menyertakan sarana dan prasarana untuk mendukung program-program yang akan dijalankan tersebut.

## 2. Program

Program merupakan tahap-tahap dalam penyelesaian rangkaian kegiatan yang berisi langkah-langkah yang akan dikerjakan untuk mencapai tujuan dan merupakan unsur pertama yang harus ada demi tercapainya kegiatan implementasi. Program akan menunjang implementasi, karena dalam program telah dimuat berbagai aspek antara lain:

- a. Adanya tujuan yang ingin dicapai.
- b. Adanya kebijaksanaan-kebijaksanaan yang diambil dalam mencapai tujuan itu.
- c. Adanya aturan-aturan yang harus dipegang dan prosedur yang harus dilalui.
- d. Adanya perkiraan anggaran yang dibutuhkan.
- e. Adanya strategi dalam pelaksanaan (Manila, 2006 : 43).

Selanjutnya Keban (2004: 35), menyebutkan: Apakah program efektif atau tidak, maka stándar penilaian yang dapat dipakai adalah

organisasi, interpretasi, penerapan. Ketiga standar penilaian tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Organisasi

Maksudnya disini ialah organisasi pelaksanaan program. Selanjutnya organisasi tersebut harus memiliki struktur organisasi, adanya sumber daya manusia yang berkualitas sebagai tenaga pelaksana dan perlengkapan atau alat-alat kerja serta didukung dengan perangkat hukum yang jelas. Struktur organisasi yang kompleks, struktur ditetapkan sejak semula dengan desain dari berbagai komponen atau subsistem yang ada tersebut. Sumber daya manusia yang berkualitas berkaitan dengan kemampuan aparatur dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Aparatur dalam hal ini petugas yang terlibat dalam pelaksanaan program. Tugas aparat pelaksana program yang utama adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat yang dipercayakan kepadanya untuk mencapai tujuan negara. Agar tugas-tugas pelaksana program dapat dilaksanakan secara efektif maka setiap aparatur dituntut memiliki kemampuan yang memadai sesuai dengan bidang tugasnya.

b. Interpretasi

Maksudnya disini agar program dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan atau ketentuan yang berlaku, harus dilihat apakah pelaksanaannya telah sesuai dengan petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

- 1) Sesuai Dengan Peraturan  
Sesuai dengan peraturan berarti setiap pelaksanaan kebijaksanaan harus sesuai dengan peraturan yang berlaku baik Peraturan Tingkat Pusat, Propinsi, Kabupaten.
- 2) Sesuai Dengan Petunjuk Pelaksana.  
Sesuai dengan petunjuk pelaksana berarti pelaksanaan kebijaksanaan dari peraturan sudah dijabarkan cara pelaksanaannya pada kebijaksanaan yang bersifat administratif, sehingga memudahkan pelaksana dalam melakukan aktifitas pelaksanaan program.
- 3) Sesuai Petunjuk Teknis  
Sesuai dengan petunjuk teknis berarti kebijaksanaan yang sudah dirumuskan dalam bentuk petunjuk pelaksana dirancang lagi secara teknis agar memudahkan dalam operasionalisasi program. Petunjuk teknis ini bersifat strategis lapangan agar dapat berjalan efisien dan efektif, rasional dan realistis.

#### c. Penerapan

Maksudnya disini peraturan/kebijakan berupa petunjuk pelaksana dan teknis telah berjalan sesuai dengan ketentuan, untuk dapat melihat ini harus dilengkapi dengan adanya prosedur kerja yang jelas, program kerja serta jadwal kegiatan yang disiplin.

- 1) Prosedur kerja yang jelas Prosedur kerja yang sudah ada harus memiliki prosedur kerja agar dalam paelaksanaannya tidak terjadi tumpang tindih, sehingga tidak bertentangan antara unit kegiatan yang terdapat di dalamnya.
- 2) Program kerja Program kerja harus sudah terprogram dan terencana dengan baik, sehingga tujuan program dapat irealisasikan dengan efektif
- 3) Jadwal kegiatan Program yang sudah ada harus dijadwalkan kapan dimulai dan diakhiri suatu program agar mudah dalam mengadakan evaluasi. Dalam hal ini yang diperlukan adanya tanggal pelaksanaan dan rampungnya sebuah program sudah ditentukan sebelumnya

#### 3. Implementasi Program

Program merupakan unsur pertama yang harus ada demi tercapainya kegiatan implementasi. Unsur kedua yang harus di

penuhi dalam proses implementasi program yaitu adanya kelompok masyarakat yang menjadi sasaran program, sehingga masyarakat dilibatkan dan membawa hasil dari program yang dijalankan dan adanya perubahan dan peningkatan dalam kehidupannya. Tanpa memberikan manfaat kepada masyarakat maka dikatakan program tersebut telah gagal dilaksanakan. Berhasil atau tidaknya suatu program di implementasikan tergantung dari unsur pelaksanaannya (eksekutif). Unsur pelaksanaan ini merupakan unsur ketiga. Pelaksanaan penting artinya karena pelaksanaan baik itu organisasi maupun perorangan bertanggungjawab dalam pengelolaan maupun pengawasan dalam proses implementasi. (Riggs, 2005:54).

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi program adalah tindakan-tindakan yang dilaksanakan oleh individu-individu atau pejabat-pejabat terhadap suatu objek atau sasaran yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui adanya organisasi, interpretasi dan penerapan.

Guna mencapai tujuan impementasi program secara efektif, pemerintah harus melakukan aksi atau tindakan yang berupa penghimpunan sumber dana dan pengelolaan sumber daya alam dan manusia. Hasil yang diperoleh dari aksi pertama dapat disebut input kebijakan, sementara aksi yang kedua disebut sebagai proses implementasi kebijakan (Ratmiko, 2005:4). Untuk mengoperasionalkan implementasi program agar tercapainya suatu

tujuan serta terpenuhinya misi program diperlukan kemampuan yang tinggi pada organisasi pelaksanaannya.

#### 4. Tahapan Implementasi Program

##### a. Perencanaan

Perencanaan berasal dari kata rencana yaitu pengambilan keputusan tentang apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan. Perencanaan adalah salah satu fungsi aktivitas manajemen dalam mencapai tujuan secara efektif dan efisien dengan alat atau sarana prasarana guna menunjang keberlangsungan suatu program (Sanjaya, 2012:23). Menurut Ulbert Silalahi perencanaan merupakan kegiatan menetapkan tujuan serta merumuskan dan mengatur pendayagunaan manusia, informasi finansial, metode dan waktu untuk memaksimalkan efisiensi dan efektivitas pencapaian tujuan. Siswanto berpendapat bahwa perencanaan adalah proses dasar yang digunakan untuk memilih tujuan dan menentukan cakupan pencapaiannya. Menurut George R. Terry perencanaan ialah proses dasar yang digunakan oleh kelompok untuk mencapai tujuan yang digariskan (Terry, 2012).

##### b. Pelaksanaan

Pelaksanaan merupakan kegiatan melaksanakan segala sesuatu yang telah direncanakan untuk mencapai tujuan. Senada dengan pendapat Aswarni Sujud yang menyatakan bahwa pelaksanaan merupakan kegiatan melaksanakan apa-apa yang

telah direncanakan. Menurut George R. Terry pelaksanaan (actuating) merupakan usaha menggerakkan anggota-anggota kelompok sedemikian rupa hingga mereka berkeinginan dan berusaha untuk mencapai sasaran (Terry, 2012). Rusman berpendapat bahwa pelaksanaan (actuating) tidak lain merupakan upaya untuk menjadikan perencanaan menjadi kenyataan, dengan melalui berbagai pengarahan dan pemotivasian. Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut, maka dapat disimpulkan pelaksanaan adalah kegiatan melaksanakan rangkaian kegiatan yang telah direncanakan untuk mencapai tujuan yang diharapkan (Rusman, 2009). Pelaksanaan merupakan suatu kegiatan dari sebuah rencana yang disusun secara matang dan detail, penerapannya biasanya dilakukan setelah perencanaan yang sudah dianggap siap untuk dilaksanakan. Pelaksanaan juga diartikan sebagai penerapan

#### c. Evaluasi

Menurut Suharsimi Arikunto evaluasi adalah kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang bekerjanya sesuatu yang selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk menentukan alternative yang tepat dalam pengambilan keputusan. Menurut Eka Prihatin evaluasi adalah suatu proses pengumpulan data menganalisis informasi tentang efektifitas dan dampak dari suatu tahap atau keseluruhan program. Menurut Hartati Sukirman

evaluasi adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mengukur sampai sejauh mana hasil-hasil yang telah dicapai berdasarkan atas rencana yang telah ditetapkan (Sukirman, 2007). Berdasarkan beberapa pendapat diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa evaluasi adalah suatu kegiatan yang untuk mengetahui informasi tentang pelaksanaan program dan informasi tersebut digunakan untuk menentukan alternatif yang tepat dalam pengambilan keputusan.

Evaluasi adalah suatu proses dalam merencanakan, memperoleh, menyediakan informasi yang sangat diperlukan untuk membuat alternatif-alternatif keputusan (Djiwandono, 2009:397), evaluasi berarti proses penilaian untuk menggambarkan prestasi yang dicapai seseorang sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan (Syah, 2010:139).

### **C. Nilai-Nilai Pada Ruang Belajar Aqil di Kota Malang**

#### **1. Kepedulian (*Awareness*)**

##### **a. Nilai transparansi**

Menurut Mahmudi (2016:17) transparansi memiliki arti keterbukaan organisasi dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang menjadi pemangku kepentingan. Transparansi juga berarti adanya penjelasan manajemen organisasi tentang aktivitas, program dan kebijakan yang sudah, sedang dan akan dilakukan

beserta sumber daya yang digunakannya. Menurut Ritonga dan Syahrir (2016) transparansi tidak hanya sebatas ketersediaan informasi dan informasi tersebut dapat diakses oleh publik, namun juga disajikan (dipublikasikan) dengan tepat waktu. Informasi yang dipublikasikan dengan tepat waktu tentunya akan lebih bermanfaat dan berpengaruh dalam pengambilan keputusan publik terkait dengan penyelenggaraan organisasi

Menurut Nurhayati (2017) menyatakan bahwa definisi transparansi adalah memberikan informasi yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan. Menurut Hoesada (2019:273) Asas transparansi mengandung unsur mengandung unsur pengungkapan dan penyediaan informasi yang memadai dan mudah diakses. Transparansi informasi diperlukan agar pengawasan oleh masyarakat terhadap penyelenggaraan organisasi dapat dilakukan secara objektif. Untuk itu, diperlukan penyediaan informasi dan dokumentasi yang dapat diakses dengan mudah tentang kebijakan publik serta pelaksanaannya.

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa transparansi merupakan prinsip untuk menjamin kebebasan bagi

setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan dengan kata lain transparansi dapat diartikan sebagai keterbukaan dalam melaksanakan suatu proses kegiatan yang terkait dengan pengelolaan sumber daya kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi.

b. Akuntabilitas

Kata akuntabilitas berasal dari bahasa Inggris *accountability* yang berarti keadaan yang dapat dipertanggung jawabkan. Itulah sebabnya, akuntabilitas menggambarkan suatu keadaan atau kondisi yang dapat dipertanggung jawabkan. Pada dasarnya, akuntabilitas adalah pemberian informasi dan pengungkapan (*disclosure*) atas aktivitas dan kinerja finansial kepada pihak-pihak yang berkepentingan (Purba dan Amrul, 2018). Dalam melaksanakan akuntabilitas publik, organisasi sektor publik berkewajiban untuk memberikan informasi sebagai bentuk pemenuhan hak-hak publik. Hak-hak publik itu antara lain:

- 1) Hak untuk tahu (*right to know*)
- 2) Hak untuk diberi informasi (*right to be informed*), dan
- 3) Hak untuk didengar aspirasinya (*right to be heard and to be listened to*) (Wiguna dan Dwilingga, 2020).

Secara umum definisi akuntabilitas adalah sebagai kewajiban-kewajiban dari pihak yang dipercayakan untuk mengelola sumber-sumber daya publik dan yang bersangkutan

dengan kegiatan untuk dapat menjawab hal-hal yang menyangkut pertanggungjawabannya. Akuntabilitas terkait erat dengan instrumen untuk kegiatan kontrol terutama dalam hal pencapaian hasil pada pelayanan publik dan menyampaikannya secara transparan kepada masyarakat sebagai suatu proses pemberian pertanggungjawaban dan memberi jawaban. Akuntabilitas menurut Teguh (2008:2) dapat diartikan sebagai kewajiban-kewajiban dari individu-individu atau penguasa yang dipercayakan untuk mengelola sumber-sumber daya publik dan yang bersangkutan dengannya untuk dapat menjawab hal-hal yang menyangkut pertanggungjawabannya. Akuntabilitas terkait erat dengan instrumen untuk kegiatan kontrol terutama dalam hal pencapaian hasil pada pelayanan publik dan menyampaikannya secara transparan kepada masyarakat

Secara umum akuntabilitas adalah sebagai suatu proses pemberian pertanggungjawaban dan memberi jawaban kepada pihak yang berkepentingan atas tindakan atau kegiatan yang telah dilakukan. Pihak yang berkepentingan dalam suatu tindakan atau kegiatan bukan hanya saja pimpinan lembaga tetapi juga pihak pemerintah dan masyarakat umum. Menurut Syahrudin Rasul (2002:8) akuntabilitas adalah : Kemampuan memberi jawaban kepada otoritas yang lebih tinggi atas tindakan seseorang/sekelompok orang terhadap masyarakat luas dalam suatu organisasi.

c. Profesionalitas dan amanah.

Istilah profesional itu berlaku untuk semua aparat mulai dari tingkat atas sampai tingkat bawah. Profesionalisme dapat diartikan sebagai suatu kemampuan dan keterampilan seseorang dalam melakukan pekerjaan menurut bidang dan tingkatan masing-masing. Profesionalisme menyangkut kecocokan antara kemampuan yang dimiliki oleh birokrasi dengan kebutuhan tugas, terpenuhi kecocokan antara kemampuan dengan kebutuhan tugas merupakan syarat terbentuknya aparatur yang profesional. Artinya keahlian dan kemampuan aparat merefleksikan arah dan tujuan yang ingin di capai oleh sebuah organisasi (Kurniawan, 2005:74). Menurut Andrias Harefa (2004:137) bahwa profesionalisme pertama-tama adalah soal sikap. Lalu dia mengatakan ada beberapa hal yang dapat dianggap mewakili sikap profesionalisme yaitu, keterampilan tinggi, pemberian jasa yang berorientasi pada kepentingan umum, pengawasan yang ketat atas perilaku kerja dan suatu sistem balas jasa yang merupakan lambing prestasi kerja.

Definisi amanah sangat luas cakupannya. Amanah meliputi segala yang berkaitan hubungan interpersonal antar manusia dan hubungan dengan Sang Penguasa Alam, yaitu Allah. Menurut Ibnu Katsir (2013) amanah adalah semua tugas atau pembebanan agama yang meliputi perkara dunia dan akhirat yang ditujukan kepada manusia. Dari segi bahasa, amanah berasal dari bahasa arab yang

berarti aman, jujur, atau dapat dipercaya. Sementara menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2013) amanah adalah sesuatu yang dititipkan kepada orang lain, setia, dan dapat dipercaya. Amanah merupakan kepercayaan yang diberikan kepada seseorang untuk ditunaikan kepada yang berhak (Amirin, 2007). Orang yang amanah adalah orang yang dapat menjalankan tugas yang diberikan.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa amanah meliputi tiga dimensi. Pertama, berkaitan dengan hubungan dengan Allah. Dalam hal ini amanah dilihat lebih luas dan dalam. Amanah diartikan sebagai kewajiban hamba kepada Allah yang harus dilakukan manusia. Kedua, terkait dimensi antar manusia. Dalam hal ini amanah dilihat sebagai karakter terpuji dan tugas yang harus dilaksanakan. Ketiga, diri sendiri. Pada dimensi ini amanah dilihat sebagai sesuatu yang harus dikerjakan untuk kebaikan dirinya. Ketiga dimensi tersebut saling terkait satu sama lain, artinya ketika hanya satu dimensi yang dijalankan, maka amanahnya belum sempurna. Misalkan, ketika individu menunaikan amanahnya kepada Allah seperti menjalankan sholat, tetapi dalam hubungan interpersonal tidak berperilaku amanah, maka dalam perspektif islam individu tersebut belum dikatakan amanah.

## 2. Pembelajaran (*Learning*)

### a. Nilai bervisi ke depan

Kata visi berasal dari bahasa Inggris yaitu *vision* yang berarti penglihatan, daya lihat, pandangan, impian, atau bayangan. Secara etimologi, visi diartikan sebagai persepsi yang didasarkan pada pemikiran mendalam tentang masa depan yang akan dicapai. Secara umum visi adalah kemampuan untuk melihat inti persoalan atau kemampuan untuk melihat kedepan.

Visi merupakan gambaran tentang masa depan yang realistis dan ingin diwujudkan dalam kurun waktu tertentu. Sebagaimana Camal (2016: 54) menjelaskan visi adalah pernyataan yang diucapkan atau ditulis hari ini, yang merupakan proses manajemen saat ini dan menjangkau pada masa yang akan datang. Sedangkan bagi lembaga, visi merupakan imajinasi moral yang menggambarkan profil organisasi yang diinginkan di masa datang. Imajinasi ke depan itu akan selalu diwarnai oleh peluang dan tantangan.

### b. Bermakna konstruktif

Kata konstruktivistik berasal dari akar kata konstruktif yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti memiliki sifat memperbaiki, membangun, serta membina, sedangkan dalam bahasa Inggris disebut dengan *constructive* yang berarti sesuatu yang membangun (*the one who builds*) (Efgivia, Ry, et al., 2021),

dalam istilah psikologi, kata konstruktif diartikan sebagai pemikiran yang menghasilkan kesimpulan baru (*thoughts that produce new conclusions*) (Efgivia, Adora Rinanda, et al., 2021), dan dalam konteks filsafat pendidikan, konstruktivisme diartikan sebagai aliran atau paham yang berupaya membangun tata susunan hidup yang berbudaya modern (Suparlan, 2019), dengan demikian dapat ditarik benang merah bahwa teori konstruktivistik secara istilah adalah suatu teori yang sifatnya membangun suatu pemikiran-pemikiran sehingga menghasilkan suatu kesimpulan yang bersifat mutakhir atau baru.

Pengertian teori konstruktivistik juga banyak dikemukakan oleh para ahli, menurut Alan Pritchard & John Woollard mengatakan “*In terms of learning, constructivism holds that individuals construct their own understanding of the world around them by gathering information and interpreting it in context of past experiences*” (Alan Pritchard and John Woollard, 2010). Teori konstruktivistik dalam proses pembelajaran memandang bahwa pembelajar dikatakan telah belajar apabila mereka mampu membangun atau mengkonstruksi pemahaman mereka sendiri tentang dunia di sekitar mereka dengan cara mengumpulkan informasi dan menafsirkannya serta mengaitkannya dengan pengalaman yang telah mereka dapatkan sebelumnya.

c. Bersesuaian.

Pada dasarnya perilaku bersesuaian adalah perilaku yang sesuai dengan norma, nilai, dan peraturan yang berlaku. Perilaku bersesuaian dapat dilakukan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

#### **D. Konsep Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)**

Pengertian LSM Studi tentang LSM merupakan suatu fenomena baru dalam ranah sistem politik Indonesia. Istilah LSM ini sendiri merupakan bentuk dari adaptasi bahasa Inggris *Non Governmental Organisations (NGOs)*. Edward dan Humme mendefinisikan istilah NGOs sebagai kategori organisasi yang batasannya sangat luas terjadi dari lembaga yang beragam. Abdul Hakim Garuda Nusantara mengatakan bahwa LSM memang sulit dirumuskan. Namun secara sederhana bisa diartikan sebagai gerakan yang tumbuh berdasarkan nilai-nilai kerakyatan. Tujuannya untuk menumbuhkan kesadaran dan kemandirian masyarakat yang akhirnya meningkatkan kesejahteraan rakyat (Cholisin, 2002)

Dari pemetaan paradigma LSM Hope and Timmel memetakan posisi politis aktifis LSM menjadi topologi tipe lipatan sebagai berikut

- 1) Perspektif Konformisme Tipe pertama terdiri atas aktifis LSM yang melakukan pekerjaan mereka berdasarkan kepada paradigma bantuan karitatif, atau sering disebut “bekerja tanpa teori” atau mereka yang berorientasi pada proyek dan bekerja organisasi yang menyesuaikan diri dengan sistem dan struktur yang ada. Pada dasarnya, motivasi

utama bagi program dan aktifitas mereka adalah menolong rakyat dan didasarkan pada niat baik untuk membantu mereka yang membutuhkan.

2) Perspektif Reformis Kategori kedua ini didasarkan pada ideology modernisasi dan *developmentalisme*, dimana sekitar 80% mayoritas aktifis LSM mengikuti paradigma reformis ini. Hal yang menjadi tema utama paradigma ini menekankan pada partisipasi masyarakat terhadap pembangunan. Dengan menempatkan isu-isu korupsi di pemerintah sebagai sebab utama dari keterbelakangan masyarakat. Mereka lebih memperhatikan pada aspek pendekatan dan metodologi dalam gerakannya serta mendukung *developmentalisme*. Tujuan utama pandangan ini adalah merubah pendekatan atas ke bawah dan bersikap non partisipatif ke arah pendekatan yang lebih menekankan pada partisipasi dan swadaya masyarakat.

3) Perspektif Transformative Tipe ini merupakan alternatif terhadap 2 pendekatan terdahulu. Salah satu perspektif ini adalah mempertanyakan paradigma mainstream dan ideology yang tersembunyi di dalamnya serta berusaha menemukan paradigma alternatif yang akan mengubah struktur dan supra struktur yang menindas rakyat dan kemungkinan membuka potensi kemanusiaanya. Paradigma ini memungkinkan bagi rakyat untuk mengontrol produksi informasi dan ideology mereka sendiri. Pendekatan ini biasanya ditemukan pada kalangan LSM yang bekerja pada isu-isu lingkungan. Semangat kontra hegemoni kapitalis dengan jelas ditunjukkan oleh LSM ini melalui Koran dan majalahnya.

Hal tersebut diterjemahkan lewat aksi dalam program kampanye dan advokasi mereka membela dan mendukung petani miskin, rakyat pribumi dan kelompok termarginalkan mereka (Fakih, 2004).

